

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel Komunikasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi Jogo Tonggo dalam penanggulangan covid-19 di Kabupaten Cilacap.
2. Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi Jogo Tonggo dalam penanggulangan covid-19 di Kabupaten Cilacap.
3. Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi Jogo Tonggo dalam penanggulangan covid-19 di Kabupaten Cilacap.
4. Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi Jogo Tonggo dalam penanggulangan covid-19 di Kabupaten Cilacap.
5. Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi Jogo Tonggo dalam penanggulangan covid-19 di Kabupaten Cilacap.

5.2 Implikasi Penelitian

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang dirancang sebelumnya, sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antar hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan, Sehingga kebijakan itu efektif jika mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ditetapkan (Abdul Wahab, 2012). Efektivitas kebijakan merupakan hasil dari implementasi kebijakan dan program-program yang telah dibuat sebelumnya, implemetasi kebijakan yang memberikan dampak positif sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan telah efektif karena keberhasilan dalam penerapan program-program yang telah disusun.

Berhasilnya kebijakan yang diimplementasikan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, disposisi, sumberdaya dan struktur birokrasi. Empat fakor tersebut telah dioptimalkan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka penanganan Corona Virus Diseases 2019 dapat tercapai dan efektif.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud efektivitas implementasi yaitu konsep yang merujuk pada ketercapaian tujuan dari kegiatan proses implementasi yang ada. Sehingga, dengan adanya penelitian ini, mampu diketahui bagaimana efektivitas proses kegiatan implementasi Program Jogo Tonggo yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap. Implementasi kebijakan

dikatakan berhasil apabila sasaran atau tujuan kebijakan itu dapat dicapai yang dinyatakan dengan istilah efektivitas. Secara umum, efektivitas merupakan kriteria untuk mengukur sampai sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Nurman, 2023) yang memberikan arti efektivitas sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif.

Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana pihak pelaksana kebijakan berkomunikasi, baik secara *bottom-Up* untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan melaporkan perkembangan keadaan, maupun *topdown* untuk menyampaikan informasi dan mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan kebijakan. Komunikasi menjadi sarana bagi pelaksana kebijakan untuk saling bertukar informasi dan memberikan ide-ide masukan terkait kebijakan sehingga terjalin kerjasama yang baik pada internal pelaksana kebijakan maupun external dengan pihak yang terlibat dengan kebijakan ini.

Faktor sumberdaya akan sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan, sumberdaya dalam hal ini terbagi dua yaitu, sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia. Sumberdaya finansial menjadi factor yang sangat krusial mengingat pandemi virus corona memerlukan biaya yang sangat mahal untuk menanganinya seperti pemenuhan fasilitas dan alat-alat kesehatan serta fasilitas umum untuk

mencegah penyebaran virus. Selain itu, dampak luas pandemi ini mengakibatkan penurunan pada beberapa sektor kehidupan seperti sektor ekonomi, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya akibat pandemi sehingga kesejahteraan masyarakat juga menjadi tanggung jawab besar pemerintah. Sumberdaya manusia juga sangat berpengaruh dalam kebijakan ini, orang-orang yang ahli sangat dibutuhkan seperti dokter dan para petugas kesehatan yang mengurus pasien, pembuat kebijakan dan juru bicara untuk mengomunikasikan kebijakan ini kepada masyarakat. Selain itu juga diperlukan peran petugas keamanan untuk membantu pelaksanaan tugas.

Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi kebijakan ini karena profesionalitas, komitmen dan tanggung jawab pelaksana kebijakan akan sangat dibutuhkan mengingat pandemi ini telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh presiden melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 sehingga program-program kebijakan harus mampu disikapi secara tepat dan cerdas oleh pihak pelaksana kebijakan agar tercapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Faktor struktur birokrasi juga akan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, struktur birokrasi yang jelas akan memberikan rantai komando yang jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam implementasi kebijakan karena mengikuti satu kesatuan perintah. Struktur birokrasi yang jelas juga akan memberikan kejelasan tanggung jawab pada tiap-tiap unit pelaksana sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih tugas maka peran organisasi akan efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang penting. Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam mensikapi perilaku aparat yang menyimpang, pilihan proram merupakan upaya mengimplementasikan kebijakan *in-built* mekanisme yang menjamin

transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. Terutama, menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan ketrampilan khusus.

Dengan demikian, implementasi kebijakan publik tidak hanya mencakup operasionalisasi kebijakan publik ke dalam mekanisme birokratis, tapi juga terkait dengan bagaimana agar kebijakan publik tersebut dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh kelompok sasaran. Hal ini merupakan bagian dari proses politik. Sebagai bagian dari proses politik, maka implementasi kebijakan publik juga perlu memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, sehingga kebijakan publik tersebut dapat mencapai harapan yang diinginkan.

